



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS 4,00 / 99,93%

Jumlah	103 Responden				
Jenis Kelamin	Laki - laki : 75	Perempuan:	28		
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	SD : 2	SMP : 3	SMU : 33	S3 : 0
		Diploma : 8	S1 : 52	S2 : 3	
Pekerjaan	SWASTA : 23	WIRUSAHA : 17	TENAGA KONTRAK : 12		
	PNS : 13	TNI : 0	POLRI : 2		
	LAINNYA : 36				

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | | |
|---|---|------|
| 1 | Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) | 3,98 |
| 2 | Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,99 |
| 3 | Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 4,00 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

Berdasarkan hasil survei dan kesimpulan yang telah disampaikan, ada 3 (tiga) fokus perbaikan/tindakan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil survei sebagai berikut :

- Untuk memperbaiki Indikator Transaksi Pembayaran, direkomendasikan:
 - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Raha sekarang sudah tidak menggunakan biaya radius yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan melainkan yang digunakan aplikasi sehingga biaya radius dapat diminimalisir;
 - Agar petugas PTSP dapat menjelaskan bahwa biaya yang dibayar oleh Pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Raha adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan biaya tersebut tidak masuk ke kas perorangan atau pengadilan;
- Untuk memperbaiki Indikator Transparansi Biaya, direkomendasikan:
 - Mencantumkan biaya biaya/tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik pada ruang tunggu sidang maupun pada ruang tunggu PTSP dan dimuat dalam website pengadilan;
 - Petugas PTSP maupun petugas informasi selalu memberitahukan biaya yang dikenakan atas pengguna pelayanan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
- Untuk memperbaiki Indikator Transaksi Rahasia, direkomendasikan:
 - Himbauan anti gratifikasi berdasarkan Lampiran SEMA Nomor 17 Tahun 2019 yang ditempel diatas Meja Majelis Hakim agar selalu dibaca oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Raha, 3 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Raha

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.
NIP. 19780826 200112 1 001